

FAKTOR NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK YORDANIA DENGAN QATAR: ANALISIS DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN DAN IDENTITAS NASIONAL

Nizzah Amalia Subchan
Departemen Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
E-mail: namaliasubchan@gmail.com

Abstrak

Yordania sebagai negara yang diapit beberapa negara berkonflik serta tidak memiliki kekayaan sumber daya alam membuat aliansi sangat penting bagi keberlangsungan negara tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, Yordania seringkali beraliansi dengan aktor-aktor hegemon untuk mendapatkan status pelindung maupun bantuan finansial. Maka dalam cakupan Timur Tengah, Yordania memilih beraliansi dengan negara Arab Saudi beserta koalisinya di kawasan Teluk dalam Gulf Cooperation Council. Aliansi ini dilanjutkan hingga pada krisis diplomatik Qatar tahun 2017, Yordania terpaksa memutuskan hubungan dengan Qatar agar aliansi dengan kerajaan Saudi tidak rusak. Namun pada 2019, Yordania melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Qatar setelah hubungan mereka renggang dua tahun. Keputusan ini juga datang meskipun Arab Saudi beserta koalisinya belum melakukan normalisasi dengan Qatar sendiri, dan dapat berpotensi membahayakan eksistensi Yordania jika melakukan tindakan tersebut karena bertentangan dengan koalisi Saudi. Maka peneliti berusaha untuk menganalisis fenomena ini menggunakan teori keamanan kawasan dan level analisis identitas nasional. Peneliti kemudian menemukan motif yang melatarbelakangi keputusan tersebut merupakan adanya dukungan Qatar terhadap status pelindung Yerusalem milik Yordania.

Kata Kunci: Yordania; Qatar; Normalisasi Hubungan Diplomatik; Keamanan Kawasan; Identitas Nasional

Pendahuluan

Berbeda dengan negara-negara tetangganya dalam kawasan Timur Tengah, Yordania seringkali tidak mendapatkan sorotan yang besar, hal ini dikarenakan mereka menjadi satu-satunya negara yang tidak ikut mengalami kejadian *Arab Spring* pada tahun 2011 dan tetap mengalami stabilisasi secara politis. Selain itu, Yordania diapit oleh

berbagai negara berkonflik seperti Irak, Israel, dan Suriah, serta tidak kaya akan sumber daya alam baik itu minyak seperti kebanyakan negara di Timur Tengah ataupun air. Dalam dinamika kawasan itu sendiri, Yordania tidak pernah mengalami konflik yang serius dengan negara lain. Ia bahkan menjadi salah satu diantara dua negara yang berani menandatangani sebuah perjanjian perdamaian dengan

Israel. Ia juga menjadi salah satu anggota pelopor dari *Organization of Islamic Cooperation* dan *Arab League* (Mediterranean Affairs, 2014). Akibat posisi tersebut, konstelasi perpolitikan negara-negara disekitarnya menjadi krusial bagi keberlangsungan Yordania. Maka pada 5 Juni 2017, saat Bahrain, Uni Emirat Arab (selanjutnya UAE), Mesir, serta Arab Saudi resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Qatar dan menanggukkan pasukan Qatar yang ikut serta dalam koalisi pimpinan Saudi di Yaman, kejadian itu secara langsung mempengaruhi Yordania. Yordania semakin terperangkap dalam peperangan diplomatik tersebut saat Arab Saudi dan UAE meminta negara lain untuk mengikuti perilaku mereka sebagai bentuk solidaritas (Chuqhtai, 2018). Tuntutan yang kemudian disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan aliansinya berjumlah 13, yang secara umum memerintahkan Qatar untuk, membatasi hubungan diplomatik dengan Iran; mengakhiri kehadiran militer Turki di Qatar; memutuskan seluruh ikatan dan pendanaan untuk organisasi atau kelompok “teroris”, yang disebutkan secara spesifik yaitu Ikhwanul Muslimin,

Al Qaeda, *Islamic States*, dan Hizbullah Lebanon; menutup stasiun media Al-Jazeera maupun portal berita lainnya yang didanai Qatar; mengakhiri intervensi dalam urusan domestik negara lainnya dengan menghentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, UAE, Mesir dan Bahrain, serta membayar reparasi dan kompensasi untuk kerugian finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar. Demi mematuhi seluruh tuntutan tersebut, Qatar akan dipantau audit keuangannya untuk 10 tahun, dan harus menyetujui seluruh tuntutan tersebut dalam 10 hari atau daftar tersebut akan dibatalkan (Wintour, 2017).

Menjelang dua hari setelah tuntutan tersebut dipublikasi, pada 7 Juni 2019 Yordania ikut mengumumkan keputusan mereka untuk mengurangi hubungan diplomatik dengan Qatar melalui penarikan diplomat dari masing-masing negara dan mencabut lisensi saluran satelit Al-Jazeera yang berada di Amman, sesuai pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri negara untuk urusan media dan juru bicara pemerintah Mohammad Momani.

“studying the causes of the crisis witnessed in the ties between Egypt, Saudi Arabia, the UAE and Bahrain and Qatar, the government has decided to reduce diplomatic representation with the State of Qatar and revoke the licence of Al Jazeera channel’s office in the Kingdom”

Momani menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan itu dilakukan demi kepentingan negaranya dan kawasan Teluk.

“Achieving regional stability and security, consensus among Arabs over policies that are prone to end the crises of the region and collective efforts to protect the national state and building a secure and bright future for our peoples will always remain priorities that the Kingdom will do its utmost to realize”.

Meskipun perilaku tersebut mendapat banyak kecaman dari publik akibat hubungan menguntungkan yang selama ini dimiliki oleh kedua belah pihak, Raja Abdullah II tetap melanjutkan keputusan tersebut (Jordan Times, 2017). Hal ini

dikarenakan Yordania sangat tergantung pada Arab Saudi untuk bantuan ekonomi dan energi. Arab Saudi menjadi penopang finansial bagi Yordania setelah perekonomian Yordania mulai terpuruk akibat meningkatnya pengungsi yang pada mulanya hanya berasal dari Palestina namun semakin bertambah akibat Perang Sipil Suriah. Ini diiringi dengan hutang publik yang mencapai 94 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara mereka dan pengangguran yang tinggi di angka 18.5 persen. Selain itu, adanya tekanan dari *International Monetary Fund* (IMF) yang memberi pinjaman bernilai US\$723 juta ke kerajaan Yordania, membuat Perdana Menteri Yordania Hani Mulki terpaksa menyusun langkah-langkah penghematan yang drastis pada bulan Mei 2018. Hal ini memicu protes publik yang cukup besar dengan menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana untuk menaikkan pajak penghasilan dan memotong subsidi untuk listrik, bahan bakar, dan makanan (Agence France-Presse, 2018). Maka ketergantungan pemerintah pada bantuan asing sangat tinggi. Respons kerajaan yang hanya sebatas mengurangi relasi dianggap oleh koalisi sebagai sebuah

tindakan pembangkangan dan dispekulasi oleh para pejabat Yordania menjadi alasan utama Arab Saudi menolak untuk memperbarui bantuannya pada 2017. Hal ini kemudian memiliki dampak yang cukup besar pada kemampuan Yordania mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapinya (Furlow dan Borgognone, 2018).

Pemutusan hubungan yang diajukan Arab Saudi dan koalisinya seharusnya hanya berlangsung selama enam bulan. Sekitar 60 persen dari perdagangan Qatar mengalami transit melalui pelabuhan UAE dan perbatasan Saudi, sehingga isolasi yang dilakukan mereka diharapkan dapat menciptakan disrupsi fatal pada keberlangsungan Qatar. Namun sikap Qatar yang mengacuhkan permintaan mereka memperpanjang krisis diplomatik tersebut sehingga mencapai tahun ketiganya pada 2019 tanpa adanya perkembangan. Situasi ini diperburuk oleh keputusan Qatar untuk normalisasi dengan Iran dan semakin mempererat kerjasama dengan Turki. Meski begitu, Arab Saudi beserta negara lainnya tetap kukuh dan masih menutup perbatasan negara mereka, memotong semua rute

udara, laut, dan darat, serta menghentikan kerjasama politik maupun ekonomi dengan Qatar (Habibi, 2019).

Namun memasuki bulan Juli 2019, salah satu negara menyatakan keinginannya untuk menciptakan kembali hubungan diplomatik dengan Qatar setelah dua tahun menarik duta besar mereka dari negara tersebut, yaitu Yordania. Hal ini menjadi berita mengejutkan pasalnya Arab Saudi, UAE, Bahrain, dan Mesir masih tidak menunjukkan tanda akan mundur dari sanksi-sanksi yang telah diberikan kepada Qatar. Meski begitu, Yordania tetap menetapkan seorang duta besar yaitu Zeid al-Lawzi, seorang Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk ditempatkan di Doha. Sebaliknya pemerintah Qatar juga mengirimkan delegasinya, Saud bin Nasser bin Jassem al Thani, anggota dari keluarga kerajaan ke ibu kota Yordania, Amman (Salama, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilihat adanya suatu hal yang menarik untuk diteliti yaitu alasan Yordania untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar. Hal ini merupakan sebuah anomali mengingat

bahwa persetujuan Qatar dengan empat negara tersebut yang memutuskan hubungan diplomatik dengannya masih berlanjut, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh secara signifikan pada perekonomian Yordania yang mengalami ketergantungan dengan Arab Saudi.

Kerangka Pemikiran

Terdapat dua kerangka yang dapat menjelaskan mengapa Yordania memutuskan untuk normalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Qatar. Kerangka pertama menjelaskan bahwa lingkungan eksternalnya juga ikut mempengaruhi, dalam hal ini peneliti menggunakan *regional security complex theory* untuk menganalisa dinamika kawasan Timur Tengah. Buzan menyatakan bahwa sebuah *security complex* dapat hadir saat sekelompok negara memiliki permasalahan keamanan primer yang terikat sedemikian dekat sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain (Buzan dan Waeber, 2003: 41). Hal ini kemudian dapat menciptakan sebuah keamanan kawasan. Maka konsep

regional security complex muncul dan definisi RSC kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dari pengertian *region* sebelumnya, menjadi memiliki arti sebagai ‘seperangkat unit yang mana proses sekuritisasi, desekuritisasi, ataupun keduanya sangat terikat sehingga permasalahan keamanan mereka tidak dapat dianalisa maupun diselesaikan secara terpisah antara satu sama lain (Buzan dan Waeber, 2003: 44). Untuk menganalisa dinamika suatu kawasan, Buzan menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menyusun struktur inti dari sebuah RSC. Pertama adalah kondisi geografis, yang membedakan kompleksitas antara tiap kawasan, contohnya di Asia sendiri yang dapat dibagi menjadi tiga *regional security complex* berbeda, yaitu di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun Asia Timur dan memiliki kasus-kasus tersendiri. Kedua adalah pandangan Buzan bahwa *regional security complex* merupakan replikasi dari struktur anarki dalam tingkatan lokal, dimana adanya koeksistensi dari dua atau lebih unit otonom yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Ketiga merupakan *polarity* yang menjelaskan distribusi

kekuatan antar tiap unit dan bagaimana ini membentuk arah kebijakan dari negara-negara di kawasan tersebut. Terakhir adalah konstruksi sosial yang menggambarkan pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan) diantara negara-negara dalam kawasan. Pola ini dapat dicerminkan melalui tindakan dan interpretasi para negara saat memilih untuk melakukan aliansi maupun perlawanan dalam satu regional (Buzan dan Waever, 2003: 53).

Kerangka kedua menjelaskan bagaimana identitas nasional sebagai salah satu faktor internal, dapat mempengaruhi suatu negara saat membuat kebijakan luar negeri. Penelitian ini kemudian menekankan pada *aspirational constructivism* yang dikemukakan oleh Anne Clunan. Teori ini menitikberatkan adanya korelasi antara bagaimana identitas nasional dibentuk dan pengaruhnya dalam mengkonstruksi pandangan kepentingan nasional yang kemudian dipromosikan oleh para elit politik. Salah satu proposisi inti dari *aspirational constructivism* adalah bagaimana memori historis dan aspirasi yang terbentuk olehnya merupakan

determinan krusial dalam menerima sebuah identitas sebagai *self-defining* negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa agensi berperan signifikan didalamnya (Clunan, 2005: 24). Bagi sebuah negara, identitas dan kepentingan nasionalnya bertumpu pada dua pilar, yaitu tujuan politik dan status internasional. Tujuan politik meliputi fitur internal dan kepercayaan tentang sistem pemerintahan ekonomi dan politik yang sesuai buat negara, sedangkan status internasional terdiri dari posisi negara dalam hierarki internasional kekuatan baik itu politik, militer, dan sosial (Clunan, 2009: 31). *Aspirational constructivism* berasumsi bahwa elit politik kemudian akan membentuk sebuah orientasi behavioral terhadap tindakan kooperasi, kompetisi, maupun konfrontasi dengan sebuah negara berdasarkan konteks *self-image*, yang juga terdiri dari konstruksi *ingroup* dan *outgroup* (Clunan, 2009: 47).

Pengaruh *Regional Security Complex* terhadap Keamanan Yordania

Untuk memahami dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah, perlu

dielaborasi elemen-elemen yang membedakannya dari yang lain dan faktor-faktor yang menciptakan divergensi di wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan sejarah dari tiap negara yang mempengaruhi persepsi keamanan. Setelah Perang Dunia I, negara-negara baru mulai terbentuk di Timur Tengah yang diwujudkan dibawah pengawasan penjajah mereka, Inggris dan Perancis. Hal ini tidak berlaku untuk Arab Saudi, Turki, dan Iran karena tidak mengalami kolonisasi. Keterlibatan kekuatan eksternal dalam pembentukan negara ini menjadi penting untuk disebutkan karena menjadi alasan terciptanya dinamika konflik di negara-negara ini sebab perbatasan modern sekarang sebelumnya ditentukan oleh mereka (Klein, 2015). Khususnya bagi Timur Tengah, Buzan dan Waever mengkarakteristikkan *security complex* yang tercipta atas bantuan para penjajah tersebut sebagai sebuah bentuk ‘formasi konflik yang *perennial*’. Hal ini dimaksud bahwa interdependensi yang berlangsung di Timur Tengah tidak merupakan kooperasi namun sebuah kompleks yang didorong oleh konflik (Coskun, 2008: 92).

Formasi konflik ini hadir akibat adanya sejumlah relasi inter-regional di Timur Tengah. Salah satunya yang paling mendefinisikan kawasan tersebut terpusat di kawasan Syam yang terdiri dari Mesir, Lebanon, Yordania, Irak, Suriah, Israel, dan Palestina. Kawasan ini terbentuk atas permasalahan lokal antara Israel dan Palestina, yang kemudian memelopori permusuhan yang lebih kuat kepada Israel oleh tetangga-tetangganya, dan selanjutnya seluruh komunitas Arab (Buzan dan Waever, 2003: 190 -1). Hal ini juga menjadi dasar enam perang *interregional* yang diikuti oleh hampir seluruh negara di Timur Tengah. Sejatinya, konflik Arab-Israel mendefinisikan bagaimana kemudian nasionalisme Arab terbentuk dan kemudian memberikan Timur Tengah secara keseluruhan koherensinya sebagai suatu RSC pada mulanya. Interrelasi kedua merupakan kawasan Teluk yang dikarakteristikkan oleh rivalitas antara Iran, Irak, dan negara Teluk Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, dan Oman. Konflik utama pada kawasan ini adalah saat Iran dan Arab Saudi mulai mengejar status hegemon di Timur Tengah dengan

mempromosikan ideologinya yaitu Arabisme dan Islamisme yang bertentangan. Walaupun subkompleks Syam dan Teluk kemudian memiliki inti berbeda dalam kompleks keamanan Timur Tengah, isu-isu yang terjadi saling tumpang tindih. Sama hal dengan subkompleks terakhir yaitu relasi negara di kawasan Maghreb antara Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Chad, dan Sahara Barat (Buzan dan Waever, 2003: 191-3). Meski tidak terlalu terikat dengan subkompleks lainnya, konflik Tunisia pada tahun 2011 memiliki *domino effect* ke seluruh negara Timur Tengah. Maka seperti pengertian *security complex* yang dikemukakan oleh Buzan dan Waever dan pemaparan diatas, Timur Tengah dapat didefinisikan sebagai sebuah kawasan yang terdiri dari negara dengan permasalahan keamanan primer yang saling berkorelasi begitu dekat sehingga keamanan nasional mereka tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Sehingga untuk mengetahui dinamika RSC tersebut dibentuk perlu adanya analisis agenda yang dimiliki oleh kompleks keamanan Timur Tengah.

Diantara kawasan lainnya, Timur Tengah dikatakan memiliki tingkat keamanan kawasan yang bersifat otonom. Otonom dalam hal ini bermaksud bahwa meskipun adanya campur tangan yang berat dari pihak eksternal secara kontinu, dinamika konflik yang berlangsung didalam Timur Tengah merupakan persoalan yang internal (Buzan dan Waever, 2003: 193). Perkembangan kerjasama keamanan regional Timur Tengah dalam sejarah kontemperor global khususnya paska *Arab Spring* kemudian mempengaruhi keberlangsungan Yordania secara signifikan. Adanya paska *Arab Spring* menyebabkan transformasi struktural yang mendalam karena jatuhnya sejumlah rezim yang telah lama menopang negara-negara tersebut. Hal ini kembali menyebabkan perubahan besar dalam kooperasi dan preferensi keamanan, serta adanya *Balance of Power* yang baru. Selain itu, sebuah tema utama menyelimuti ketidakstabilan kawasan Timur Tengah ini yaitu sekuritisasi identitas. Hal ini terlihat pada tujuan aliansi umumnya, yang dilatarbelakangi oleh pembagian Sunni dan Syi'ah (Fawcett, 2013: 211). Selain itu, banyak hadirnya grup insurgensi karena

perpecahan sektarian mendominasi isu keamanan di Timur Tengah dan menciptakan masalah keamanan baru yaitu 'human security' dengan meningkatnya pengungsi. Menurut Eljertsen (2018: 14) masalah keamanan yang membentuk kerjasama regional pada periode sebelumnya dengan sekarang, paska *Arab Spring* merupakan kontinuitas atau intensifikasi dari isu keamanan sebelumnya yaitu konflik Israel-Palestina yang kembali muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengajukan solusi baru, peran identitas, dan perjuangan untuk kedaulatan.

Maka kompleks keamanan yang dihadirkan oleh Timur Tengah kemudian mempengaruhi Yordania secara signifikan sebagai negara yang terletak di posisi sentral dinamika kawasan tersebut. Hal ini dapat dianalisa menggunakan empat elemen, pertama yaitu perbatasan yang mana Yordania dikelilingi oleh negara berkonflik, Suriah, Irak, Israel, dan Palestina. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, isu keamanan baru yang hadir paska *Arab Spring*, merupakan urgensi *human security* yang meningkat dengan eskalasi perang.

Human security diartikan oleh Gelvin (2018: 137) sebagai pembebasan manusia dari ancaman yang intens, luas, dan berkepanjangan yang membuat hidup dan kebebasan mereka rentan. Salah satu kasus yang menjadikan gagasan ini sentral merupakan perang di Suriah yang meletus pada Maret 2011. Konflik ini pada mulanya hanya merupakan sebuah insurgensi yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim Assad namun kemudian bertransisi ke perang sipil dan tidak kunjung selesai. Hal ini juga dipengaruhi faktor sejumlah aktor negara maupun non-negara yang ikut campur tangan menjadikan perang ini berkepanjangan. Maka setelah lebih dari delapan tahun, perang ini telah berujung pada estimasi 560.000 kematian dan penyebaran 12 juta pengungsi ke seluruh penjuru dunia yang kemudian menghadirkan urgensi isu pengungsi global, namun secara intens pada kompleks keamanan Timur Tengah (Alshoubaki dan Harris, 2018: 154-5).

Elemen kedua merupakan struktur anarki, yang dikatakan oleh Waltz (dalam Gause III, 1999: 17) menjadi dorongan utama perilaku aliansi di Timur Tengah. Tanpa

adanya sebuah otoritas utama dalam tatanan sistem politik internasional, maka dengan kondisi tersebut tiap negara terpaksa mengembangkan aliansi *balancing* sehingga kemerdekaannya dan eksistensinya tidak terancam. Lebih lanjutnya dengan adanya struktur anarki, elemen ketiga menunjukkan terdapat polaritas di Timur Tengah. Pada mulanya persaingan kekuatan didominasi oleh Arab Saudi dan Iran. Namun dinamika tersebut semakin berubah dengan kehadiran Israel yang memperlihatkan pendekatan asertif pada negara-negara Arab lain setelah kepemimpinan Benjamin Netanyahu serta kebangkitan Turki dibawah Recep Tayyip Erdogan. Bagi Yordania sendiri polaritas ini mempengaruhi kebijakannya secara erat, akibat posisinya yang hanya sebagai *middle power* sehingga membutuhkan kerjasama untuk keberlangsungannya. Khususnya polaritas kekuatan pada Arab Saudi akibat kekayaan minyaknya telah lama mendominasi arah kebijakan Yordania sejak kemerdekaannya. Kemudian elemen keempat yaitu *amity* and *enmity*. Akibat perekonomian Yordania yang terpuruk, ia mengkonstruksikan persahabatan dan

permusuhannya menggunakan kacamata pragmatis.

Analisis Identitas Nasional Yordania terhadap Pemilihan Aliansi

Alasan selanjutnya Yordania melakukan restorasi dengan Qatar merupakan faktor identitas nasional negara tersebut sejak awal pembentukannya pada 1921. Pendirian Yordania oleh penjajah Inggris merupakan akibat kekalahan keluarga Hasyimiyah mempertahankan daerah Hijaz (sekarang Arab Saudi) yang menjadi rumah untuk dua situs teragung Islam yaitu Mekkah dan Madinah (Paris, 2003: 355). Kehilangan posisi tersebut yang sekaligus merupakan legitimasi keluarga Hasyimiyah sebagai keturunan Nabi Muhammad lalu menjadi dorongan untuk Raja Abdullah I memiliki ambisi ekspansionisme yang diupayakan dengan menyerap teritori-teritori baru dalam struktur politik dan nasional Yordania, salah satunya Yerusalem. Yerusalem kemudian berhasil didapatkan dalam perang Arab-Israel pertama dengan menganeksasi *West Bank*. Abdullah berusaha memperluas gagasan tentang identitas Yordania agar konsisten dengan

situasi geopolitik, dan hal ini dilakukan melalui penciptaan sebuah posisi simbolis-politis, yaitu sebagai ‘Pelindung dari Yerusalem’ (Katz, 2005: 46-9). Usaha Yordania untuk mengubah status kota tersebut dikatakan berhasil sesuai jejak rekam Inggris yang mencatat aksi-aksi simbolis Yordania di Yerusalem, seperti melakukan renovasi pada situs-situs suci Kubah Batu dan restorasi Masjid Al-Aqsa, menyelesaikan perselisihan kaum Kristen, melakukan perayaan tahunan Isra’ Mi’raj dengan mengundang tokoh-tokoh Muslim dan Arab dari seluruh penjuru dunia, serta menyelenggarakan Ziarah Kepausan (Katz, 2005: 55).

Legitimasi atas posisi Yordania di Yerusalem kemudian datang dalam bentuk konkret di perjanjian perdamaian Israel-Yordania 1994. Dalam perjanjian tersebut artikel 9, Israel mengaku hak bersejarah Yordania di Yerusalem, khususnya pada perlindungan dan pengawasan tempat-tempat suci Islam. Israel setuju untuk ‘memberikan prioritas tinggi’ untuk Yordania terkait Yerusalem saat menegosiasikan status permanen kota tersebut dengan otoritas Palestina, jika

sampai pada tahap tersebut (Israel Ministry of Foreign Affairs, 1994). Posisi Yordania semakin terkonsolidasi setelah pada 2013, dibawah kepemimpinan Raja Abdullah II, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani sebuah perjanjian di Amman yang menegaskan kembali status pelindung Raja terhadap situs-situs suci di Yerusalem, dan menyatakan bahwa Raja Abdullah II memiliki hak untuk mengerahkan seluruh upaya hukum untuk melindunginya, terutama Masjid Al-Aqsa (Jerusalem Post, 2013). Perjanjian ini membangkitkan kembali identitas Yordania di Yerusalem dan terus dipertahankan oleh Raja Abdullah II ditengah pergolakan Timur Tengah pada abad ke-21 dan usaha-usaha untuk merebut status pelindung Yerusalem dari Yordania. Beberapa pernyataan yang menunjukkan posisinya,

“My position on Jerusalem is unwavering. To me, Jerusalem is a red line, and all my people are with me. No one can pressure Jordan on this matter, and the answer will be no. All Jordanians stand with me on Jerusalem. At the end of the day, Arabs and Muslims will stand with

us as well
(kingabdullah.jo, 2019)”

Namun, pernyataan Trump pada Desember 2017 yang merekognisi Yerusalem sebagai ibukota Israel dan merencanakan alokasi Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem memicu berbagai permusuhan lama dan klaim legitimasi historis pada situs tersebut. Keprihatinan Yordania terletak pada permusuhan lama antara Arab Saudi dan Yordania yang mulai nampak kembali pada Desember 2017, dua minggu sebelum AS mengeluarkan pernyataan official terkait Yerusalem, dimana pihak Saudi mengutarakan kembali niatnya untuk menantang status pelindung Hasyimiyah. Penyampaian tersebut dilakukan pada pertemuan *Arab Inter-Parliamentary Union* oleh delegasi Saudi yang menghina Yordania dengan menolak penyebutan peran historis Yordania terkait Yerusalem pada draf dokumen (Ziadat, 2017). Demi kelancaran tujuan tersebut, putra mahkota Saudi telah mengintensifikan pemulihan hubungan Saudi-Israel dengan mengajak beberapa negara Teluk lainnya seperti Bahrain dan UAE. Pemulihan ini datang dengan dikeluarkannya rencana

perdamaian milik AS yaitu *Deal of the Century* pada tahun 2019. *Deal of the Century* sendiri merupakan sebuah dokumen rancangan Jared Kushner, penasihat senior Trump, yang diumumkan secara resmi dalam konferensi perdamaian yang disponsori oleh AS di Bahrain bulan Juni 2019, sebagai rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik panjang antara Palestina dan Israel. Poin utama dari perjanjian tersebut memberikan hak kepada Israel untuk memiliki kedaulatan penuh atas Yerusalem. Hal ini menjadi sebuah ketakutan bagi Yordania bahwa ada kemungkinan Saudi bekerjasama dengan dukungan AS dan Israel akan mendirikan sebuah administrasi atas tempat suci Islam di Yerusalem yang akan berada dibawah supervisi Saudi. Peristiwa ini dapat mengurangi otoritas Palestina dalam urusan-urusan Yerusalem, serta secara efektif membatalkan status pelindung Yordania terhadap Yerusalem (TRT World, 2019). Sebagai tanggapan, Yordania telah bergerak secara cepat membentuk berbagai aliansi demi dukungan regional serta semakin melibatkan diri dengan isu-isu Yerusalem. Beberapa aliansi yang

diintensifikasi merupakan Turki, Maroko, serta salah satunya Qatar yang ikut menegaskan pentingnya menyatukan dukungan penuh Arab terhadap status pelindung Hasyimiyah (Albawaba, 2019).

Dalam menganalisa bagaimana kemudian status pelindung Yerusalem mempengaruhi kebijakan luar negeri Yordania, teori *aspirational constructivism* dapat digunakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proposisi inti dari teori ini adalah pengaruh memori historis dan aspirasi dalam mempersepsikan sebuah identitas sebagai *self-defining* negara tersebut. Namun, *self-image* ini hanya dapat diterima sebagai identitas nasional jika merupakan sebuah identitas kolektif, karena kelompok kolektif inilah yang berperan menginkorporasikannya ke dalam pemikiran rakyat negara. *National self-image* yang dimiliki oleh Yordania sendiri digambarkan oleh kemimpinannya untuk menjadi pelindung dari salah satu situs suci untuk tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, yaitu Yerusalem. Kepemimpinan inipun di legitimasi secara domestik dan internasional karena kontribusi Yordania terhadap

pemeliharaan dan penjagaan situs di dalam Kota Suci itu. *Self-image* tersebut kemudian diterima menjadi salah satu komponen identitas nasional Yordania karena adanya kelompok kolektif, yaitu monarki Hasyimiyah, yang mengintegrasikannya dalam diskursus politik dan menyebarluaskannya ke masyarakat sebagai nilai dan norma negara.

Kemudian sesuai pernyataan Clunan jika kemudian *self-image* tersebut dapat mendominasi diskursus politik, citra tersebut akan diinstitutionalisasi dalam hukum dan regulasi domestik serta obligasi dan norma perilaku dalam relasi dengan negara lainnya. Sebuah *self-image* kemudian menjadi dominan jika dalam rentang waktu yang lama dapat bertahan dan diakui oleh dunia internasional. Maka dalam hal ini, *self-image* Yordania sebagai pelindung Yerusalem menjadi dominan karena diterima oleh komunitas internasional dan meskipun mengalami pergolakan dalam prosesnya, *self-image* ini melekat terus setelah Yordania didirikan pada tahun 1922 hingga sekarang. Setelah diterima *self-image* ini akan mendefinisikan kepentingan

nasional negara tersebut dan membentuk konstruksi *ingroup* beserta *outgroup*nya. Adanya konstruksi tersebut mempengaruhi pilihan orientasi behavioral mereka ke suatu negara melalui pola *amity* dan *enmity*. Yordania kemudian mendefinisikan *ingroup* mereka sebagai negara yang mengakui dan mendukungnya sebagai pelindung Yerusalem, sehingga aliansi perlu dijaga dan dipertahankan. Sedangkan negara yang mengancam eksistensi *self-image* tersebut dikategorikan sebagai *outgroup*nya, seperti Israel, AS, maupun akhir-akhir ini Arab Saudi yang mengancam posisi pelindung Yordania.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menemukan motif mendasari tindakan Yordania untuk memulihkan hubungan dengan Qatar merupakan identitasnya sebagai pelindung Yerusalem. Dalam memahami motif ini, peneliti menggunakan level analisis identitas nasional milik Anne Clunan, yaitu *aspirational constructivism*, khususnya pada salah satu aspirasi Yordania yaitu

sebagai pelindung dari situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Status pelindung tersebut merupakan hal yang integral dalam identitas Yordania dan Hasyimiyah akibat diskursus politik yang digiatkan oleh pendiri Yordania pertama, yaitu Raja Abdullah. Sehingga Yerusalem dianggap sebagai legitimasi agama mereka di ranah internasional yang menunjukkan kepentingannya di kota suci tiga agama tersebut. *Self-image* ini lalu mempengaruhi kebijakan luar negeri Yordania karena ia mengkonstruksikan pola persahabatan dan permusuhan berdasarkan identitas Yerusalem ini. Maka Yordania akan lebih cenderung beraliansi dengan negara yang mendukung status pelindung tersebut khususnya setelah perjanjian *Deal of the Century* keluar. Dalam hal ini, Arab Saudi menentang status tersebut dan ingin menyaingi Yordania untuk mendapatkan Yerusalem, sedangkan Qatar menegaskan kepentingan dari Yordania dan memberi dukungan politik terhadap status ini. Oleh karena itu dapat dijelaskan mengapa pada akhirnya Yordania tetap melakukan aliansi dengan Qatar meskipun terancam juga hubungannya dengan Arab Saudi.

Daftar Pustaka

Buku

Buzan, Barry dan Ole Waever. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.

Clunan, Anne L. 2009. *The Social Construction of Russia's Resurgence: Aspirations, Identity, and Security Interests*. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press. Ch.1 & 2.

Fawcett, Louise. 2013. *International relations of the Middle East*. Oxford: Oxford University Press.

Gelvin, James L. 2018. *The new Middle East: what everyone needs to know*. Oxford: Oxford University Press.

Katz, Kimberly. 2005. *Jordanian Jerusalem: Holy Places and National Spaces*. Gainesville: University Press of Florida.

Paris, Timothy J. 2003. *Britain, The Hashemites and Arab Rule 1920–1925*. London: Frank Cass Publishers.

Journal

Ades, Alberto dan Hak B. Chua. 1997. "Thy Neighbor's Curse: Regional Instability and Economic Growth," dalam *Journal of Economic Growth*, Vol 2, pp. 279-304.

Coşkun, Bezen B. 2008. "Regionalism and Securitization: The Case of the Middle East," dalam Harders, Cilja dan Legrenzi, Matteo (eds) *Beyond Regionalism: Regional Cooperation, Regionalism and Regionalization in the Middle East*. Hampshire: Ashgate.

Ejlertsen, Dan. 2018. "The Regional Security Cooperation in Contemporary Middle East," dalam *Centre for Contemporary Middle East Studies*, pp. 1-16.

Gause III, F. Gregory. 1999. "Systemic Approaches to Middle East International Relations," dalam *International Studies Review*, Vol. 1 (1), pp. 11-31.

Daring

Agence France-Presse. 2018. "Jordan: thousands protest against IMF-backed austerity measures" [online]. dalam <https://www.albawaba.com/news/emir-qatar-affirms-jordanian-custodianship-jerusalem-1279288> [diakses 25 September 2019].

Albawaba. 2019. "Emir of Qatar Affirms Jordanian Custodianship of Jerusalem" [online]. dalam <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/03/jordan-amman-protest-imf-austerity-measures> [diakses 17 November 2019].

Chuqhtai, Alia. 2018. "Understanding the blockade against Qatar" [online]. dalam <https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/understanding-blockade-qatar->

- [180530122209237.html](#) [diakses 26 September 2019].
- Furlow, Rachel dan Salvatore Borgognone. 2018. "Gulf Designs on Jordan's Foreign Policy" [online]. dalam <https://carnegieendowment.org/sada/76854> [diakses 2 Oktober 2019].
- Habibi, Nader. 2019. "Qatar's Blockade Enters Third Year: Who Are the Winners and Losers?" [online]. dalam <https://theglobepost.com/2019/06/17/qatar-crisis-gcc/> [diakses 25 September 2019].
- Israel Ministry of Foreign Affairs. 1994. "Israel-Jordan Peace Treaty" [online]. dalam <https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/israel-jordan%20peace%20treaty.aspx> [diakses 25 November 2019].
- Jerusalem Post. 2013. "Abbas, Abdullah sign agreement on Jerusalem holy sites" [online]. dalam <https://www.jpost.com/Middle-East/Abbas-Abdullah-sign-agreement-on-Jlem-holy-sites-308273> [diakses 24 November 2019].
- Jordan Times. 2017. "Jordan reduces diplomatic representation with Qatar" [online]. dalam <http://jordantimes.com/news/local/jordan-reduces-diplomatic-representation-qatar> [diakses 30 September 2019].
- Kingabduallah.jo. 2019. "King: Jerusalem is a red line, my position on it is unwavering and all my people are with me" [online]. dalam <https://kingabduallah.jo/en/news/king-jerusalem-red-line-my-position-it-unwavering-and-all-my-people-are-me> [diakses 22 November 2019].
- Klein, Jeff. 2015. "The Colonial Roots of Middle East Conflict" [online]. dalam <https://www.counterpunch.org/2015/10/22/the-colonial-roots-of-middle-east-conflict/> [diakses 10 November 2019].
- Mediterranean Affairs. 2014. "The role of Amman in the Middle East crisis" [online]. dalam <http://mediterraneanaffairs.com/the-role-of-amman-in-the-middle-east-crisis/> [diakses 30 Oktober 2019].
- Salama, Faith. 2019. "Jordan, facing pressure at home, restores relations with Qatar" [online] dalam <https://thearabweekly.com/jordan-facing-pressure-home-restores-relations-qatar> [diakses 28 September 2019].
- TRT World. 2019. "Five things to know about the leaked 'deal of the century'" [online]. dalam <https://www.trtworld.com/middle-east/five-things-to-know-about-the-leaked-deal-of-the-century-26540> [diakses 8 November 2019].
- Wintour, Patrick. 2017. "Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia" [online]. dalam <https://www.theguardian.com/world/2017/jun/23/close-al-jazeera-saudi-arabia-issues-qatar-with-13->

demands-to-end-blockade [diakses 1 Oktober 2019].

Ziadat, Anwar. 2017. "News Seeks To Create State of Tension Between Jordan, Saudi Arabia" [online]. dalam [https://akeed.io/en/post/1606/News Seeks To Create State of Tension Between Jordan Saudi Arabia](https://akeed.io/en/post/1606/News-Seeks-To-Create-State-of-Tension-Between-Jordan-Saudi-Arabia) [diakses 21 November 2019].